

## ANALISIS PEREKONOMIAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Handayani Megasari, Syamsul Amar, Idris

---

### *Abstract*

*This article focused on analyze (1) The effect of consumption, investment, government spending, taxes, inflation, net exports and poverty on the economy in Indonesia, (2) The effect of the economy, inflation, government spending, wages, education and unemployment on poverty in Indonesia. This research is descriptive and associative. While this type of data is the documentary data, the data source is a secondary data as well as data in the form of time series from 1983 - 2013 in this study using a simultaneous equations model analysis with Two Stages Least Squared method (TSLS). Endogenous variables in the study is the economy and poverty. While exogenous variables are consumption, investment, government spending, inflation, net exports, taxes, wages, education and unemployment. The study concluded that (1) consumption, investment, government spending, net exports significantly affect poverty in the Indonesian economy. The increase in the consumption, investment, government spending, net exports and poverty reduction will lead to an increase in the Indonesian economy. If the decline in the consumption, investment, government spending, net exports and an increase in poverty will lead to a decrease in the Indonesian economy. While inflation and taxes are not a significant effect on the economy in Indonesia (2) The economy, government spending and unemployment significantly influence poverty in Indonesia. If the economy and government spending has increased and unemployment decreased, the poverty in Indonesia will decline. However, if the economy and government spending has decreased and unemployment has increased the poverty in Indonesia will increase. Meanwhile, inflation, wages and education had no significant effect on poverty in Indonesia.*

*Keywords : Consumption, Investment, Government Spending, Taxes, Inflation, Net Export, Wages, Education, Unemployment, Economy and Poverty*

## A. Pendahuluan

Kajian tentang apa saja kelemahan mendasar perekonomian Indonesia bisa menjadi bahan diskusi dan perdebatan yang tiada habisnya. Kita tahu krisis multidimensi yang berawal dari krisis moneter 1997 telah membawa berbagai dampak merugikan. Banyaknya kebobrokan yang terjadi semasa Orde Baru sedemikian sangat parah, membuat sendi-sendi perekonomian menjadi sangat rapuh.

Kekurangan Indonesia yang sangat banyak mulai dari sistem politik yang tertutup dan otoriter, birokrasi yang kelewat gemuk dan korup, penegakan hukum yang sangat lemah, korupsi di segala bidang, berkembangnya sistem kapitalisme semu yang lebih mencuatkan pola-pola ekonomi rente, struktur perbankan yang manipulatif, sektor riil yang kurang mendapatkan perhatian, dan sebagainya.

Pada masa pascakrisis, Indonesia mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dalam soal besaran angka pertumbuhannya. Inilah indikator utama yang senantiasa digunakan para presiden mulai dari Habibie hingga SBY untuk mengklaim bahwa perekonomian Indonesia sudah *back on track*, namun tidak menunjukkan dengan kenyataan yang ada. Bahwa perekonomian Indonesia kembali tumbuh dengan mantap, sekalipun belum setinggi pada masa sebelum krisis. Masalahnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sendiri ternyata tidak berjalan sebagaimana seharusnya, karena ternyata sangat tidak seimbang dan belakangan bahkan kian tidak seimbang.

Kontribusi sektor *non tradable* dalam struktur PDB Indonesia meningkat seiring proses perkembangan Indonesia sebagai negara yang berkembang dan ingin melalui masa transisi menuju negara maju (pra kondisi menuju lepas landas). Secara perlahan namun konsisten, kontribusi sektor *non tradable* (sektor perdagangan, hotel dan restoran) mulai meningkat dan menggantikan peran sektor pertanian dan industri. Secara teoritis pergeseran struktur ekonomi menjadi syarat suatu negara dikatakan negara maju ketika sektor jasa berkontribusi besar terhadap PDB. Namun jika tidak dapat dikelola dengan baik maka perubahan struktur ekonomi akan berdampak pada munculnya

masalah baru seperti pengangguran dan distribusi pendapatan yang timpang serta memburuknya angka kemiskinan.

Jika sektor padat tenaga kerja yang dibutuhkan mengapa yang berkembang pesat justru sektor yang padat modal (Basri, 2009) Selain itu, menurutnya sektor tersier bisa berkembang lebih cepat karena pada umumnya pelaku usaha tidak mengalami kendala berat akibat ketebatasan *supply* maupun kualitas infrastruktur. Pergeseran struktur ekonomi tersebut mengharuskan terjadinya proses industrialisasi. Proses industrialisasi yang cepat juga menjadi pemicu matinya sektor pedesaan yang menyerap hampir 50% orang miskin.

Ternyata tidak semua indikator ekonomi menunjukkan hal yang menggembirakan. Data pertama yang harus dikaji pada data perkembangan Perekonomian, Kemiskinan, Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Net Ekspor dan Penerimaan Pajak di Indonesia dari Tahun 2000 – Tahun 2013 adalah penurunan tingkat investasi. Penurunan investasi sangat serius karena apabila investasi turun, maka kegiatan-kegiatan produksi secara nasional pun akan ikut turun, jika produksi turun maka dengan sendirinya output pun merosot, dan kalau output nasional terus menerus turun, maka pada gilirannya laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga akan merosot, baik dalam angka persentase pertumbuhannya sendiri dan yang lebih penting dalam kualitasnya.

Pada data Perkembangan Kemiskinan, Perekonomian, Pengeluaran Pemerintah, Upah, Inflasi, Pendidikan dan Pengangguran di Indonesia dari Tahun 2000 – Tahun 2013 juga menunjukkan ada beberapa tahun tertentu dimana kenaikan perekonomian tidak diikuti turunya angka kemiskinan dan juga beberapa tahun tertentu juga menunjukkan perkembangan perekonomian yang menurun namun kemiskinan juga mengalami penurunan.

Kondisi ini memberikan indikasi bahwa sebagian besar anggaran pemerintah yang dijadikan program belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Bahwa belanja untuk program kemiskinan terus bertambah belum menjadi ukuran prestasi. Lagi pula tingkat kemiskinan terendah pada masa

pasca krisis masih cukup jauh jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan terendah pada masa sebelum krisis (Basri, 2009).

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, namun lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut, apakah hanya segelintir orang atau sebagian besar masyarakat. Jika hanya segelintir orang yang menikmati maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan, sebaliknya jika sebagian besar turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan *gap* antara orang kaya dan orang miskin dapat diperkecil (Todaro, 2006). Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan koreksi terhadap kualitas perekonomian Indonesia. Jika tidak, maka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan akan tetap menjadi masalah pada perekonomian Indonesia dimasa depan.

Berdasarkan fenomena dan fakta di atas, untuk mengetahui sejauhmana masing-masing faktor yang mempengaruhi perekonomian dan kemiskinan di Indonesia, maka penulis tertarik mengkajinya dalam bentuk penelitian dengan judul **“Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Perekonomian dan Kemiskinan di Indonesia”**.

## **B. Metode Penelitian**

Menurut Todaro (2006) faktor kemiskinan dapat berpengaruh terhadap pencapaian laju perekonomian, salah satunya kemiskinan yang meluas menciptakan kondisi yang membuat kaum miskin tidak mempunyai akses terhadap pinjaman kredit, tidak mampu membiayai pendidikan anaknya, ketiadaan peluang investasi fisik dan moneter, yang menyebabkan pertumbuhan per kapita lebih kecil.

Mankiw (2007) menyatakan pendapatan nasional mengalami kenaikan atau penurunan menurut Teori Keynes tergantung kepada total permintaan *agregat*. Model permintaan *agregat* dibentuk dari variabel-variabel C, I, G, X –

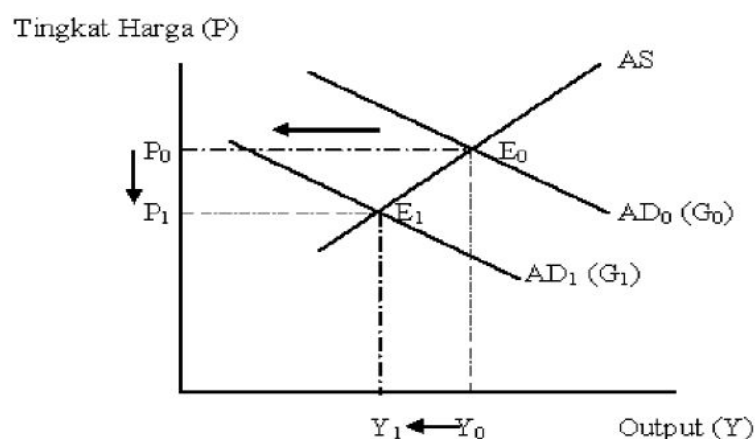
M dengan bentuk perekonomian terbuka sebagai berikut:  $Y = AD = C + I + G + NX \dots$

Froyen (2002) mengemukakan bahwa investasi juga merupakan variabel kunci dalam perubahan terhadap pendapatan. Lebih lanjut Froyen menyatakan bahwa sama halnya dengan apa yang dinyatakan oleh Keynes, bahwa investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan dalam jangka waktu yang pendek juga dipengaruhi oleh harapan investasi yang akan datang.

Menurut Samuelson (2005) menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka perlu diadakan kebijakan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena pada dasarnya APBN merupakan rencana pengeluaran program-program pemerintah dan penerimaan yang diperkirakan akan diterima untuk suatu tahun tertentu. Faktor yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah tentunya adalah faktor ekonomi.

Ekspor dan impor merupakan faktor penting dalam merangsang perekonomian suatu negara. meningkatkan output dunia serta menyajikan akses sumber daya yang langka dan pasar-pasar internasional yang potensial untuk berbagai produk-produk tersebut (Todaro, 2006).

Turunnya AD disebabkan oleh penurunan di dalam pengeluaran pemerintah, dalam gambar ini



**Gambar : Kebijakan Fiskal Kontraktif dalam Model AD-AS**

*Sumber : (Meyer, 2002)*

dapat dijelaskan bahwa adanya pengaruh yang negatif antara peningkatan pajak terhadap perekonomian. Kondisi ini dapat dilihat pada Gambar di samping.

Ada sebahagian ahli ekonomi yang berpendapat bahwa inflasi yang lunak akan dapat menjadi gawat bila tidak dikendalikan dari pemerintah (sebagai pengendali tunggal perekonomian). Ada pula ahli ekonomi yang berpendapat, yaitu bila terjadi inflasi yang dapat dikendalikan (ukurannya tergantung setiap Negara berapa inflasi yang dapat dikendalikan) atau resesi yang lunak kadang-kadang dapat menguntungkan perekonomian.

Menurut Kuznet (Tambunan, 2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

Menurut Samuelson (2005) menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka perlu diadakan kebijakan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena pada dasarnya APBN merupakan rencana pengeluaran program-program pemerintah dan penerimaan yang diperkirakan akan diterima untuk suatu tahun tertentu.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 (Bapenas, 2004) tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.

Badan Pusat Statistik (2013) mencatat tingginya laju inflasi bisa menaikkan ukuran garis kemiskinan. Pasalnya, harga barang dan jasa menjadi salah satu penentu tolok ukur garis kemiskinan. Kenaikan inflasi pasti akan menaikkan garis kemiskinan.

Pendidikan memainkan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi moderen dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).

Lincoln (2006) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya *part-time* selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin.

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian penulis diantaranya adalah Gulanda (2013) mengenai “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perekonomian, Konsumsi dan Investasi di Sumatera Barat”, dengan periode kuartal I tahun 2000 – kuartal IV tahun 2012.

Selanjutnya adalah Harta (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Ekonomi Makro Regional Sumatera Barat” penulis melihat keterkaitan antara perekonomian dan kemiskinan secara sekaligus. Sedangkan harta hanya melihat keterkaitan antara investasi dan perekonomian dengan periode penelitian kuartal I tahun 2000 – kuartal IV tahun 2010.

Selanjutnya, pada penelitian Hudaya (2009) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran memiliki korelasi positif terhadap tingkat kemiskinan. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan yang terjadinya di Indonesia salah satunya tergantung dari pendapatan yang diterima oleh masyarakat, pengeluaran penduduk terhadap pendidikan serta tergantung pada kebijakan pemerintah dalam menurunkan tingkat pengangguran.

Made Kembar (2013) berjudul “ Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali”. Dari hasil penelitian dari lima variabel independen hanya satu variabel yakni variabel  $X_1$  (pendidikan) berpengaruh tidak signifikan artinya pendidikan wajar 9 tahun belum mampu mengentaskan kemiskinan di Bali. Hasil analisis menunjukkan bahwa Wajib Belajar (SD,SMP) tidak berpengaruh secara nyata terhadap jumlah penduduk miskin

Fahirah (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa PDRB perkapita, Pengangguran, Inflasi, dan pengeluaran perkapita secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap jumlah penduduk miskin sebesar 98,11 persen.

Disamping itu, Sembiring (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Penduduk Kabupaten Karo di Sumatera Utara”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa anggaran kesehatan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan inflasi, pengangguran, dan pajak daerah berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karo.

Kerangka konseptual atau kerangka berfikir adalah sebuah konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel endogen dengan variabel eksogen yang akan diteliti berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan di atas.

Berdasarkan penjelasan teori-teori di atas, perekonomian dalam penelitian ini dipengaruhi oleh kemiskinan, konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, net ekspor, penerimaan pajak dan inflasi. Peningkatan kemiskinan akan melemahkan produktivitas sehingga akan memperlambat tumbuhnya perekonomian. Apabila konsumsi mengalami peningkatan, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga akan mengalami peningkatan. Oleh karena peningkatan produksi barang dan jasa ini akan mendorong terjadinya peningkatan perekonomian. Investasi yang mengalami peningkatan akan mendorong kegiatan penanaman modal ini dapat berbentuk pendirian pabrik baru, pembelian mesin baru, pengadaan alat-alat produksi dan lain-lain yang mendorong terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa yang pada nantinya akan mendorong peningkatan perekonomian.

Disamping itu, pengeluaran pemerintah yang meningkat misalnya untuk penyediaan atau perbaikan infrastruktur maka proses produksi barang dan jasa akan semakin lancar. Sehingga berdampak terhadap peningkatan perekonomian. Peningkatan net ekspor akan mendorong terjadinya peningkatan terhadap

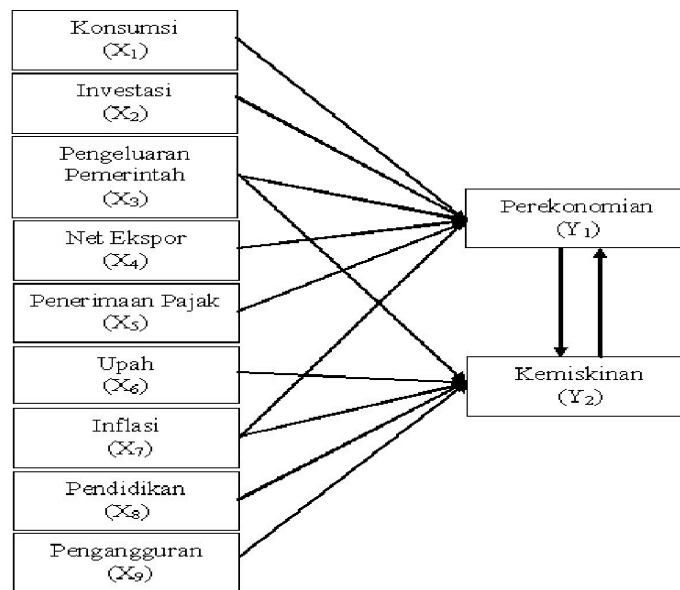


produksi barang dan jasa sebab permintaan terhadap produksi barang dan jasa meningkat di luar negeri. Semakin tingginya penerimaan pajak akan mengakibatkan lemahnya daya beli masyarakat sebab pendapatan berkurang sehingga permintaan menjadi turun. Penurunan permintaan ini akan mengurangi produksi sehingga perekonomian pun akan juga ikut turun. Apabila inflasi mengalami peningkatan maka kondisi ini akan melemahkan daya beli masyarakat sehingga konsumsi menurun. Penurunan ini akan berdampak terhadap penurunan perekonomian.

Di sisi lain, kemiskinan pada penelitian ini dipengaruhi oleh perekonomian, upah, inflasi, pendidikan dan pengangguran. Perekonomian yang meningkat akan meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi sehingga akan dapat menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan mampu mengangkat masyarakat keluar dari garis kemiskinan. Inflasi akan melemahkan daya beli riil masyarakat. Pelemahan ini akan membuat masyarakat semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Oleh sebab itu, kenaikan inflasi akan dapat meningkatkan angka kemiskinan.

Tujuan utama penetapan upah minimum adalah meningkatkan kesejahteraan dan melindungi pekerja. Adanya kenaikan tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat, sehingga akan mendorong produktivitas kerjanya. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih. Pengangguran akan menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Kondisi menganggur menyebabkan seseorang tidak memiliki pendapatan, akibatnya kesejahteraan yang telah dicapai akan semakin merosot.

Untuk melihat hubungan diantara berbagai variabel di atas, akan diperlihatkan dalam bentuk kerangka konseptual pada Gambar di bawah ini :



Gambar 2.4 : Kerangka Konseptual

Adapun hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan, konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, net ekspor, penerimaan pajak dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap perekonomian di Indonesia.

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = \alpha_5 = \alpha_6 = \alpha_7 = 0$$

$$H_a : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq \alpha_4 \neq \alpha_5 \neq \alpha_6 \neq \alpha_7 \neq 0$$

2. Perekonomian, pengeluaran pemerintah, upah, inflasi, pendidikan dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq \beta_6 \neq 0$$

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang terkait seperti laporan tahunan, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI), BPS (Badan Pusat Statistik) berbagai edisi. Data seluruh variabel yang akan diteliti ini dimulai dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2013 dengan jumlah data (n) adalah 31 periode.

### 1. Uji Stasioner

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwasannya variabel kemiskinan, pajak, dan inflasi memiliki nilai probabilitas yang kecil dari  $\alpha = 0,05$  pada *Level*, oleh karena itu variabel-variabel tersebut stasioner pada *Level*. Dan variabel perekonomian, konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, upah, pendidikan serta pengangguran memiliki nilai probabilitas yang kecil dari  $\alpha = 0,05$  pada *1<sup>st</sup> difference*, oleh karena itu variabel-variabel tersebut stasioner pada *1<sup>st</sup> difference*. Variabel Net Ekspor stasioner pada *2<sup>nd</sup> difference* dikarenakan variabel tersebut nilai probabilitasnya kecil dari  $\alpha = 0,05$  pada *2<sup>nd</sup> difference*.

### 2. Uji Kointegrasi

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa pada persamaan RESIDUAL1(-1), serta persamaan RESIDUAL2(-1) probabilitasnya kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Oleh karena itu masing-masing persamaan dalam penelitian ini berkointegrasi atau saling menjelaskan. Dengan kata lain walaupun seluruh variabel didalam masing-masing persamaan dalam penelitian ini stasioner tetapi seluruh variabel didalam masing-masing persamaan itu terdapat hubungan atau keseimbangan jangka panjang diantara variabel tersebut. Dengan demikian persamaan tidak lagi mengandung masalah regresi palsu (*spurious regression*).

### 3. Uji Kausalitas Granger

**Tabel : Hasil Uji Kausalitas Granger**

Hypothesis	F-Statistic	Probabilitas
Y1 Granger Cause Y2	6.55813	0.0170
Y2 Granger Cause Y1	8.54160	0.0087

Sumber : hasil pengolahan data dengan Eviews 6  
 $n = 31$   $\alpha = 0,05$

Dari hasil uji Kausalitas Granger pada Tabel diatas, didapatkan nilai probabilitas Perekonomian (Y1) terhadap Kemiskinan (Y2) kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Sedangkan nilai probabilitas Kemiskinan (Y2) terhadap Perekonomian (Y1) juga kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan arti kata variabel perekonomian dan kemiskinan mempunyai hubungan dua arah atau saling mempengaruhi.

#### 4. Uji Identifikasi

Uji identifikasi merupakan *order condition* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Persamaan 3.14 :  $K-k = 9-6 = m-1 = 2-1 \rightarrow 3 > 1$  (*over identified*)

Persamaan 3.15 :  $K-k = 9-5 > m-1 = 2-1 \rightarrow 4 > 1$  (*over identified*)

Hasil uji identifikasi di atas, maka penaksiran parameter dari kedua Model dapat dilakukan dengan *Two Stage Least Square* (2SLS).

#### 5. Reduce Form

Hasil *reduce form* persamaan (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

$$Y_1 = \Pi_{10} + \Pi_{11}X_3 + \Pi_{12}X_6 + \Pi_{13}X_7 + \Pi_{14}X_8 + \Pi_{15}X_9 + \Pi_{16}X_1 + \Pi_{17}X_2 + \Pi_{18}X_4 + \Pi_{19}X_5 + \Pi_{20}\mu_t$$

$$Y_2 = \Pi_{20} + \Pi_{21}X_1 + \Pi_{22}X_2 + \Pi_{23}X_3 + \Pi_{24}X_4 + \Pi_{25}X_5 + \Pi_{26}X_6 + \Pi_{27}X_7 + \Pi_{28}X_8 + \Pi_{29}X_9 + \Pi_{30}\mu_t$$

Jadi, dari hasil *reduce form* di atas dapat diketahui bahwa *endogeneous variable* adalah perekonomian dan kemiskinan, sedangkan *exogeneous variable* adalah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, net ekspor, penerimaan pajak, upah, pendidikan, inflasi dan pengangguran.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi *persamaan* perekonomian yang diolah dengan menggunakan *eviews 6* dapat ditunjukkan bahwa :

Dari *estimasi* yang telah dilakukan didapat model persamaan kurs dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Log}(Y1) = & 6.486052 + 0.149644 \text{ Log}(\text{Konsumsi}) + 0.261688 \text{ Log}(\text{Investasi}) + \\ & 0.260300 \text{ Log}(\text{Pengeluaran Pemerintah}) - 0.016835 \text{ Log}(\text{Pajak}) + \\ & 0.132179 \text{ Log}(\text{NX}) - 0.000682 \text{ Inflasi} - 0.022861 \text{ Log}(Y2) \end{aligned}$$

Estimasi *model* simultan perekonomian (Y1) di Indonesia dipengaruhi oleh konsumsi (C), investasi (I), Pengeluaran Pemerintah (G), Pajak (T), Net Export (NX), Inflasi ( $\pi$ ) dan Kemiskinan (Y2)

#### **a. Model Persamaan Kemiskinan**

Hasil estimasi persamaan kemiskinan yang diolah dengan menggunakan eviews 6 dapat ditunjukkan bahwa :

Dari estimasi yang telah dilakukan di dapat persamaan kemiskinan di Indonesia dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Log (Y2)} = & 5.425674 - 0.260041 \text{ Log(Y1)} + 0.001798 \text{ Inflasi} - 0.085639 \\ & \text{Log(Pengeluaran Pemerintah)} - 0.224982 \text{ Log(Upah)} - 1.086814 \\ & \text{Log(Pendidikan)} + 0.237098 \text{ Log(Pengangguran)} \end{aligned}$$

Estimasi model simultan kemiskinan (Y2) di Indonesia dipengaruhi oleh Perekonomian (Y1), Pengeluaran Pemerintah (G), Inflasi ( $\pi$ ), Upah, Pendidikan dan Pengangguran.

#### **a) Pengaruh Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Net Ekspor, Pajak, Inflasi dan Kemiskinan Terhadap Perekonomian di Indonesia.**

Hipotesis pada persamaan perekonomian dalam penelitian ini terbukti diterima. Dengan demikian, konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, net ekspor, pajak, inflasi dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian di Indonesia.

Secara parsial kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap perekonomian. Terdapatnya pengaruh yang signifikan dan negatif antara kemiskinan terhadap perekonomian mengindikasikan bahwa perekonomian di Indonesia ditentukan oleh kemiskinan. Hal ini sesuai menurut Todaro (2006).

Secara parsial, konsumsi berpengaruh signifikan dan positif terhadap perekonomian di Indonesia. Terdapatnya pengaruh yang signifikan dan positif antara konsumsi terhadap perekonomian mengindikasikan bahwa perekonomian di Indonesia ditentukan oleh konsumsi. Apabila konsumsi mengalami peningkatan maka

perekonomian juga akan mengalami peningkatan. Hipotesis ini sesuai dengan pendapat (Dornbusch: 2008)

Kemudian, investasi secara parsial juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Kenaikan investasi akan memicu kenaikan perekonomian karena kenaikan investasi mengindikasikan telah terjadinya kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal. Hal ini sesuai dengan pendapat Mankiw (2007) menyatakan hal berikut : “Jumlah barang-barang modal yang diminta bergantung pada tingkat bunga yang mengukur biaya dari dana yang digunakan untuk membiayai investasi.

Selanjutnya, secara parsial pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap perekonomian di Indonesia. Terjadinya peningkatan pengeluaran pemerintah misalnya untuk penyediaan atau perbaikan infrastruktur maka proses produksi barang dan jasa akan semakin lancar. Hal ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi barang dan jasa ini akan menyebabkan peningkatan terhadap perekonomian. Yang sesuai dengan pendapat menurut Samuelson (2005) menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka perlu diadakan kebijakan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena pada dasarnya APBN merupakan rencana pengeluaran program-program pemerintah dan penerimaan yang diperkirakan akan diterima untuk suatu tahun tertentu.

Begitu juga dengan net ekspor, net ekspor pun memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap perekonomian di Indonesia. Apabila ekspor mengalami peningkatan maka produksi barang dan jasa juga akan mengalami peningkatan karena net ekspor yang meningkat mengindikasikan permintaan terhadap barang dan jasa di luar negeri lebih besar dari pada permintaan barang luar negeri di dalam negeri. Hal ini juga sesuai dengan definisi (Todaro: 2006) bahwa “ Ekspor dan impor merupakan faktor penting dalam merangsang perekonomian suatu negara.

Disamping itu, pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pajak telah diatur dalam Undang-Undang dan penetapannya direncanakan dalam rapat dengan legislatif dalam bentuk RAPBN (rencana anggaran pendapatan belanja negara). Sehingga, walaupun terjadi penurunan perekonomian pada suatu periode (kuartal) pemerintah tidak dapat langsung menurunkan pajak karena ketetapan yang telah diatur. Hal ini tidak sesuai dengan teori Mankiw (2007) “Apabila pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif maka akan berdampak terhadap peningkatan kegiatan perekonomian (asumsi *ceteris paribus*).

Disamping itu, secara parsial inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Ini tidak sesuai menurut (Tambunan, 2001) bahwa “Peredaran uang yang terlalu banyak di masyarakat, mengakibatkan terlalu banyak permintaan jika produksi atau penawaran di pasar terbatas, maka tingkat inflasi akan meningkat dan inflasi yang terlalu tinggi akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

**b) Pengaruh Perekonomian, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Upah, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia.**

Hipotesis pada persamaan kemiskinan dalam penelitian ini terbukti diterima. Dengan demikian, perekonomian, inflasi, pengeluaran pemerintah, upah, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. Secara parsial, perekonomian berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Terdapatnya pengaruh yang signifikan dan negatif antara perekonomian terhadap kemiskinan mengindikasikan bahwa kemiskinan di Indonesia ditentukan oleh perekonomian. Hal ini sesuai dengan pendapat Kuznet (Tambunan, 2001).

Namun, secara parsial inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat (Froyen, 2002) dan hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori Badan

Pusat Statistik (BPS) mencatat tingginya laju inflasi bisa menaikkan ukuran garis kemiskinan.

Selanjutnya, secara parsial pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Terdapatnya pengaruh yang signifikan dan negatif antara pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan ini mengindikasikan bahwasanya kemiskinan di pengaruhi oleh pengeluaran pemerintah.

Dan secara parsial, upah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini terjadi karena rata-rata upah yang ditetapkan di Indonesia masih cenderung rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan rata-rata rumah tangga penduduk di Indonesia.

Selanjutnya, pengaruh pendidikan (*mean years schooling*) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan (Todaro, 2006). Selanjutnya, secara parsial pengangguran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Lincoln (2006) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan.

#### **D. Penutup**

Dari hasil analisis perekonomian di Indonesia, investasi mempunyai koefisien yang paling besar diantara variabel lainnya. Maka dalam hal ini untuk memperkuat kebijakan fiskal maupun moneter oleh pemerintah untuk tujuan stabilisasi atau pembangunan yang benar-benar efektif, maka dibutuhkan penanaman modal atau pembentukan modal karena nantinya akan berakibat terhadap peningkatan produksi barang dan jasa dalam perekonomian.

Sedangkan hasil analisis pada persamaan kemiskinan di Indonesia, perekonomian mempunyai koefisien yang paling besar diantara variabel lainnya, hal ini memperkuat bahwa semakin mantapnya perekonomian suatu bangsa maka mampu menekan tingkat kemiskinan dengan efektif, salah satunya dengan alokasi pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk sarana



pendidikan, karena pada penelitian ini dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah atau setara dengan tingkat SD.

#### **E. Daftar Pustaka**

Badan Pusat Statistik. Berbagai Edisi.. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial – Ekonomi Indonesia*. Jakarta : BPS.

Badan Pusat Statistik. 2013. *Pendapatan Nasional Indonesia*. Jakarta : BPS

Bappenas. (2004). *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Desa*. Jakarta.

Basri, Faisal dan Munandar, Haris. 2009. *Lanskap ekonomi Indonesia; kajian dan renungan terhadap masalah-masalah struktural, transformasi baru, dan prospek perekonomian Indonesia*. Kharisma Putra Utama

Dian, Octaviani. (2001). *Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia : Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke*, Media Ekonomi, Hal. 100-118, Vol. 7, No. 8.

Dornbusch, Rudi, Stanley Fischer & Richard Startz. (2008). *Macroeconomics*. (Roy Indra Mirazudin, SE. Terjemahan). PT Media Global Edukasi. Buku asli diterbitkan tahun 2008.

Fahirah. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Sulawesi Selatan*. Tesis

Froyen, Richard T. (2002). *Macroeconomics Theories and Policies*. Unites States: Prentice Hall.

Gulanda, Sonya. (2013). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perekonomian, Konsumsi, dan Investasi di Indonesia”. *Tesis*. Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Harta, Jefri. (2011). “Analisis Ekonomi Makro Regional Indonesia” *Tesis*. Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Hudaya, Dadan (2009). “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia*”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, ITB

Kaufman, Bruce. (2000). *The Economics of Labor Markets*. New York : The Dryden Press.

Kembar, Made. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Bali*. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

- Lincoln, Arsyad. (2006). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE-UGM.
- Mankiw, Gregory N. (2003). *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Meyer, H Laurence. (2002). *Macroeconomic, A Model Building Approach*. South-Western. Publishing Co: Chicago.
- Samuelson, Paul A dan William. D Nordhaus. (2005). *Makroekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Sembiring. (2011). Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Penduduk Kabupaten Karo di Sumatera Utara. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara
- Tambunan, Tulus T.H. (2001). *Perekonomian Indonesia, Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.